

**PENILAIAN KINERJA KEUANGAN
PADA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN
2017 – 2021**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
Akuntansi



Oleh :

**AHMAD ALI SOMBILI
1901036248
AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

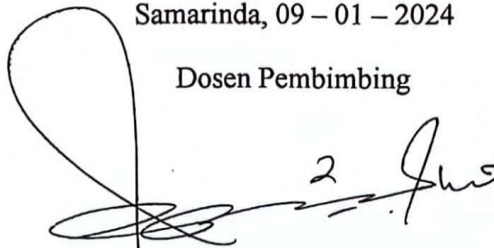
Judul Penelitian : Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017 – 2021.
Nama Mahasiswa : Ahmad Ali Sombili
NIM : 1901036248
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 09 – 01 – 2024

Dosen Pembimbing



Dr. Jamaluddin MD, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196804051995121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

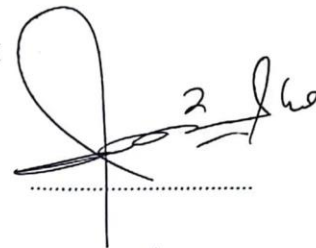
Lulus Tanggal Ujian: 14 – Desember - 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

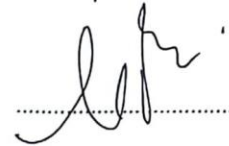
Judul Skripsi : Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017 - 2021
Nama : Ahmad Ali Sombili
Nim : 1901036248
Hari : Senin
Tanggal Ujian : 11 Desember 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Jamaluddin MD, S.E.,M.Si.,Ak
NIP 196804051995121002



2. Dr. Ledy Setiawati, S.E.,M.Si
NIP 198001102002122001



3. Hj. Nurita Affan, S.E.,M.M.,Ak.,CA
NIP 196707281994122001



RIWAYAT HIDUP



Ahmad Ali Sombili, lahir di Kota Ambon Provinsi Maluku pada tanggal 26 september 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Illias Zaid Hanafi dan Ibu Wa Yanti. Pada Tahun 2006 memulai

pendidikan di sekolah Dasar Negeri Inpres 22 Ambon hingga lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah MTS Negeri Syanawiya Ambon hingga lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah SMA Negeri 11 Ambon hingga lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata – 1 (S1) di Universitas Mulawarman Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Jurusan Akuntansi. Pada tahun 2022 mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan 48 di Kampung keay Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.

Samarinda, 16 Januari 2024

Ahmad Ali Sombili

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ali Sombili

NIM : 1901036248

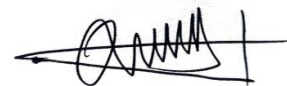
Progran Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui memberikan izin kepada UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti NonEklusif (Non-Exclusive Royalty Fee Right) atas skripsi saya yang berjudul “Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017 - 2021” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Non-Eklusif ini Kepada UPT Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat, di : Samarinda,
Tanggal : 16 Januari 2024

Yang menyatakan



Ahmad Ali Sombili

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Samarinda, 2 November 2023



ABSTRAK

Ahmad Ali Sombili, NIM 1901036248. Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017 – 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda dengan menggunakan pengukuran *Value For Money*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2017- 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen. Hasil dari penelitian ini ditinjau dari tingkat ekonomis pada tahun anggaran 2017 – 2021 menunjukkan hasil yang tidak baik karena masuk dalam kategori kurang ekonomis. Dari segi efisiensi pada tahun anggaran 2017 – 2021 menunjukkan hasil yang tidak baik karena masuk dalam kategori tidak efisien, dan dari segi efektivitas pada tahun anggaran 2017 – 2021 menunjukkan hasil yang baik karena masuk dalam kategori sangat efektif.

Kata Kunci: Analisis *Value For Money*; Kinerja Keuangan Daerah; Ekonomis; Efisiensi; Efektivitas.

ABSTRAK

Ahmad Ali Sombili, NIM 1901036248. Financial Performance Assessment of the Samarinda City Government for 2017 – 2021.

This research aims to determine the financial performance of the Samarinda City Government using the Value For Money measurement. This research is quantitative research with a descriptive approach. The data used is secondary data originating from reports on the realization of the income and expenditure budget for the Samarinda City Government in 2017-2021. The data collection technique used in this research is documents. The results of this research are reviewed from the economic level in the 2017 fiscal year– 2021 shows poor results because it is included in the less economical category. In terms of efficiency, the 2017 - 2021 budget year shows poor results because it is in the inefficient category, and in terms of effectiveness, the 2017 - 2021 budget year shows good results because it is in the very effective category.

Keywords: *Value For Money Analysis; Regional Financial Performance; Economical; Efficiency; Effectiveness.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadiratan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala karunia dan limpahan rahmatnya, serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan Studi pada program sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si Rektor Universitas Mulawarman Samarinda.
2. Ibu Prof. Dr. Syarifah selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda bersama staf atas segala pelayanan yang diberikan kepada penulis dan ditampilkan sebagaimana adanya.
3. Bapak Jamaluddin MD,SE.,M.Si.,AK selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan yang tidak terhingga nilainya.
4. Kepada bapak ibu dosen yang telah mendidik kami selama proses perkuliahan dengan sepenuh hati.
5. Terkhusus kedua orang tua tercinta, Ayahanda Bapak Illias Zaid Hanafi yang selalu berjuang dalam memberikan banyak hal termasuk pendidikan kepada penulis dan Ibunda Ibu Wa Yanti yang dengan ikhlas lahir batin merawat dan membesarkan penulis serta selalu memberi motivasi kepada

penulis hingga penulis dapat menempuh pendidikan tinggi sampai saat ini, beserta keluarga yang selalu memberikan dorongan dan bantuan serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Terkhusus penulis ucapkan kepada saudara sekandung Rahmania yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih kepada para sahabat dan temanteman alumni SD, SMP, SMA yang telah memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih kepada para sahabat dan temanteman KKN yang juga memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada teman kuliah bintang, farid, sofwan, tyo, daffa, alif rizaldy, erwin, dan rizal yang membantu saya selama perjalanan kuliah dari awal sampai akhir .
10. Terima kasih kepada teman seperjuangan dede, iqbal, refaldi, alif sufi, lukman, joel, vegas, rejak, rifqi, ajir, dicky, dan emet yang telah membantu menyelesaikan tugas ini .
11. Terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan, teman satu bimbingan yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada seluruh responden penelitian yang telah bersedia untuk berkontribusi dalam sesi tanya jawab skripsi sehingga penulis mendapatkan data penelitian dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang akan penulis terima dengan lapang dada. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah SWT dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Samarinda, 22 September



Ahmad Ali Sombili

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SKRIPSI TELAH DIUJI DINYATAKAN LULUS	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. LANDASAN TEORI	8
2.1. Kinerja Keuangan.....	8
2.1.1. Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	9
2.1.2. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	10
2.1.3. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	10
2.2. Value For Money.....	11
2.2.1. Tinjauan Kinerja Ekonomis.....	12
2.2.2. Efisiensi Kinerja Keuangan.....	12
2.2.3. Efektivitas Kinerja Keuangan.....	13
2.2.4. Indikator Value For Money.....	14
2.3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	16
2.3.1. Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	17
2.3.2. Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	18
2.4. Penelitian Terdahulu.....	20
2.5. Rerangka Pemikiran.....	22
BAB III. METODE PENELITIAN	24
3.1. Defenisi Operasional.....	24
3.2. Pendekatan Penelitian.....	25
3.3. Objek Penelitian.....	26
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	26
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.6. Alat Analisis Data.....	27
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1. Gambaran Umum Kota Samarinda.....	30
a. Visi Dan Misi Kota Samarinda.....	31
b. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)	
Kota Samarinda.....	32

4.2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Samarinda	35
4.3. Analisis Data	40
a. Pengukuran Ekonomi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarind	40
b. Pengukuran Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarinda	43
c. Pengukuran Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarinda	46
4.4. Pembahasan.....	50
4.4.1. Tinjauan Ekonomis Kinerja Pemerintah Kota Samarinda	50
4.4.3 Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarinda	51
4.4.4. Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarinda	52
BAB V. PENUTUPAN	55
5.1. Simpulan	55
5.2. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2019 – 2021	5
Tabel 2.1. Tabel 2.1 Penelitian Relevan.....	20
Tabel 3.1. Tabel 3.1. Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis.....	28
Tabel 3.2. Klasifikasi Pengukuran Rasio Efisiensi	28
Tabel 3.3. Klasifikasi Pengukuran Rasio Efektivitas	29
Tabel 4.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Samarinda Tahun 2017	35
Tabel 4.2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Samarinda Tahun 2018	36
Tabel 4.3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Samarinda Tahun 2019	37
Tabel 4.4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Samarinda Tahun 2020	38
Tabel 4.5. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Samarinda Tahun 2021	39
Tabel 4.6. Pengukuran Ekonomis Kinerja Keuangan Pemkot Samarinda Tahun 2017 – 2021	41
Tabel 4.7. Pengukuran Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017 – 2021	44
Tabel 4.8. Pengukuran Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017 – 2021	47
Tabel 4.9. Pengukuran tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas Anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017 – 2021	50

DAFTAR GAMBAR

2.1. Rearangka Pemikiran	23
4.1. Gambar Struktur Organisasi BPKAD	34
4.2. Gambar Rasio Ekonomis Pada Pemerintah Kota Samarinda.....	42
4.3. Gambar Rasio Efisiensi Pada Pemerintah Kota Samarinda.....	45
4.4. Gambar Rasio Efektivitas Pada Pemerintah Kota Samarinda.....	48
4.5. Gambar Hasil Pengukuran <i>Value For Money</i>	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak dibentuknya Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi tonggak dimulainya otonomi daerah. Acuan pemerintah daerah untuk melakukan otonomi daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seberapa besar kekuatan keuangan daerah dalam menanggung kebutuhan daerahnya dapat menjadi indikator apakah otonomi daerah pada aspek keuangan berhasil atau tidak. Karena hal tersebut maka dibutuhkan sebuah penilaian kinerja keuangan daerah agar dijadikan sebagai parameter saat suatu kebijakan tahun anggaran berikutnya ditetapkan.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menurut (Haryoko & Juliastuti, 2016) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang dituangkan dalam angka-angka rupiah. APBD dinyatakan dalam bentuk satuan uang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan daerahnya, sebagai catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurut (Kurnia 2016) pengelolaan APBD harus memiliki standar yang digunakan sebagai acuan bahwa sebuah daerah dapat dikatakan mandiri, efektif dan efisien. Maka dibutuhkan sebuah pengukuran kinerja keuangan daerah agar digunakan sebagai parameter ketika menetapkan suatu kebijakan pada tahun anggaran berikutnya.

Cara menghitung hasil pencapaian sebuah entitas adalah dengan mengukur kinerjanya. Keberhasilan lembaga pemerintah sebagai sektor publik membuat masyarakat akan mengapresiasi dengan baik pula kepada lembaga tersebut. Fokus masyarakat lebih terpusat pada kinerja Pemerintah Pusat sehingga kinerja Pemerintah Daerah terabaikan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan peraturan-peraturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. (Irham Fahmi, 2018). Pentingnya bagi masyarakat mengetahui bahwa kinerja Pemerintah Daerah berhubungan langsung dengan keuntungan yang akan diperoleh masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban atas pengelolaan program-program dari pemerintah dan mempertanggungjawabkan kinerjanya tersebut.

Pengukuran kinerja keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat indikator di atas, salah satunya dengan analisis *value for money*. Menurut (Zakia Arsiandi, 2016) adalah adanya penerapan konsep *Value For Money* dalam kegiatan evaluasi kinerja organisasi sektor publik. Penilaian kinerja berdasarkan konsep *Valu For Money* merupakan tolok ukur dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah yang berdasarkan pada ukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Ekonomis adalah pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan realisasi anggaran (*input*) dengan anggaran pengeluaran (*input value*) yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat

menimalisir *input resources* yang digunakan yaitu menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Mardiasmo, 2018).

Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil dari suatu program yang telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sederhananya, efektivitas adalah perbandingan *outcome* dengan *output* (Mardiasmo, 2018). Perkembangan konsep *Value For Money* dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik.

Manfaat perkembangan konsep *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain: (a) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik; (b) Meningkatkan mutu pelayanan publik; (c) Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya *inefisiensi* dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*; (d) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; (e) Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2018).

Salah satu metode dalam pengukuran kinerja keuangan yaitu metode *Balance Scorecard*. Namun metode ini memiliki beberapa kelemahan antara lain: (a) Memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk mengembangkan dan menjalankannya dengan baik; (b) Penilaian yang tidak objektif dan berpotensi konflik; (c) Fokus pada jangka pendek;

(d)kesulitan dalam pengukuran intangibles; (e) Menerapkan BSC memerlukan sumber daya dan biaya yang signifikan; (f) Kesulitan dalam penentuan kausalitas; (g) Kemungkinan overload informasi.

Samarinda merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur Indonesia serta kota dengan penduduk terbesar di seluruh pulau kalimantan. Sebagai pusat perekonomian di kalimantan timur, samarinda menjadi pusat kegiatan pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya yang menjadi magnet bagi masyarakat untuk berkerja dan berbisnis dan juga mencari hiburan sehingga banyak transaksi yang terjadi di Kota Samarinda. Salah satunya pajak dan retribusi yang tinggi menjadi pendapatan asli daerah Kota Samarinda. Sementara itu biaya belanja daerah dan belanja langsung untuk pembangunan fasilitas publik yang lebih lengkap dan memadai terus meningkat

Pemerintah Kota Samarinda selalu mengedepankan transparansi dan akses masyarakat terhadap informasi dalam pengelolaan anggarannya. Metode pengukuran kinerja keuangan yang digunakan Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan PP No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun hal prinsip *value for money* tidak diterapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Padahal analisis *value for money* dapat digunakan untuk menilai seberapa baik kinerja anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Samarinda dan diharapkan dapat menjadi landasan dan pedoman bagi para pengambil kebijakan, khususnya dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja yang lebih hemat, efisien, dan efektivitas.

**Tabel 1.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017 – 2021
(Dalam Rupiah)**

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2017	Pendapatan asli daerah	507.247.746.809,00	519.640.806.807,82	102,44
	Pendapatan transfer	1.854.941.640.668,00	1.768.909.871.611,00	95,36
	Pendapatan daerah yang sah	1.008.000.000,00	0	
2018	Pendapatan asli daerah	445.353.498.390,00	498.888.664.159,96	112,02
	Pendapatan transfer	1.974.656.073.426,00	2.119.660.334.837,00	107,34
	Pendapatan daerah yang sah	122.648.764.593,00	81.757.265.074,81	66,66
2019	Pendapatan asli daerah	500.991.118.323,22	560.444.857.362,80	111,87
	Pendapatan transfer	2.463.926.211.807,78	2.702.425.917.905,78	109,68
	Pendapatan daerah yang sah	99.410.000.000,00	82.649.720.000,00	83,14
2020	Pendapatan asli daerah	392.727.879.000,00	485.189.493.721,33	123,54
	Pendapatan transfer	2.097.155.527.400,00	2.291.345.796.202,00	109,26
	Pendapatan daerah yang sah	102.935.723.000,00	96.300.745.000,00	93,55
2021	Pendapatan asli daerah	2.777.546.569.409,00	2.860.333.904.522,71	102,98
	Pendapatan transfer	2.127.210.861.194,00	2.171.166.219.590,00	102,07
	Pendapatan daerah yang sah	88.842.800.000,00	115.441.304.576,00	129,94

Sumber Laporan Keuangan – PPID Samarinda

Dapat dilihat pada tabel 1.1 di atas, bagaimana perkembangan keuangan daerah dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari 2017 sampai 2021. Pada tahun 2017 pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp519.640.806.807,82. Sedangkan anggaran yang di tetapkan sebesar Rp507.247.746.809,00. Dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah pemerintah Kota Samarinda mengalami defisit dan belum memberikan kontribusi yang cukup. Pada tahun 2018 dan 2021 pendapatan asli daerah Kota Samarinda juga mengalami hal yang sama dengan tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka untuk mengetahui tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur menggunakan metode *Value For Money*. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Samarinda**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini berdasarkan latar belakang adalah kinerja keuangan berdasarkan metode *Value For Money* yang terbagi dalam 3 aspek, sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan secara ekonomis kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda?
2. Bagaimana efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda?
3. Bagaimana efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan secara ekonomis kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda.
3. Untuk mengetahui efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Samarinda
Diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan bagi Pemerintah Kota Samarinda mengenai pengelolaan keuangan sehingga nantinya penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja di Pemerintah Kota Samarinda.
2. Bagi Penulis.
Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan peneliti tentang tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran badan layanan umum daerah.
3. Pengembangan Ilmu
Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan tentang tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas pada pelaksanaan realisasi anggaran badan layanan umum daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan hal terpenting bagi pelaku bisnis karena kinerja keuangan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui apakah bisnis yang dijalankan akan tetap terus berjalan dengan baik ke depannya atau tidak. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan peraturan-peraturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. (Irham Fahmi, 2018).

Sedangkan menurut Islahuzzaman (2012), kinerja keuangan adalah perbandingan antara hasil nyata (realisasi) dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. dan menurut Sucipto (2007) mengatakan bahwa kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba.

Kinerja keuangan yang dijelaskan oleh (Irham Fahmi, 2018), (slahuzzaman 2012) dan (Sucipto 2007) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu pencapaian keberhasilan perusahaan atas berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Sebuah pencapaian dapat dilihat dari kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.

2.1.1. Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian strategi melalui tolok ukur kinerja yang ditetapkan. Tolok ukur kinerja tersebut dapat berupa pengukuran kinerja keuangan dan nonkeuangan. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik (Abdul Halim. et. al, 2012).

Sedangkan menurut Sulistiyowati (2015) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target – target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategi organisasi. Jadi pengukuran kinerja harus berbasis pada strategi organisasi.

Pengukuran kinerja sektor publik yang dijelaskan oleh (Abdul Halim. et. al, 2012) dan Sulistiyowati (2015) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian strategi melalui tolok ukur kinerja yang ditetapkan. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

2.1.2. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Tujuan sistem pengukuran kinerja sektor publik menurut Mahmudi (2015) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
3. Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward and punishment*
5. Memotivasi pegawai
6. Menciptakan akuntabilitas publik.

2.1.3. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Manfaat sistem pengukuran kinerja sektor publik menurut Mardiasmo (2018) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.

5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.2. Value For Money

Menurut Mardiasmo (2018) *Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan menurut Halim et al. (2014) *Value for money* merupakan konsep untuk melakukan pengukuran secara ekonomis, efisiensi dan efektivitas kinerja program, kegiatan dan organisasi, yaitu ekonomis terkait sejauh mana organisasi sector publik meminimalisir *input resource* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif, efisiensi terkait pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu dan efektivitas tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Value For Money yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2018) dan Halim et al. (2014) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *value for money* adalah suatu konsep pengukuran kinerja sektor publik yang memiliki tiga elemen utama: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

2.2.1. Tinjauan Kinerja Ekonomis

Tinjauan kinerja ekonomis adalah pengukuran ekonomis. Pengukuran ekonomis adalah berapa anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas tertentu. Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Ekonomis menurut Mahmudi (2015) pengertian ekonomis yaitu kaitannya dengan penggunaan *input primer* (anggaran atau kas) menjadi *input reguler* (tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal) yang dikonsumsi organisasi untuk melaksanakan kegiatan operasional.

Dalam rancangan ekonomis diharapkan organisasi sektor publik tidak melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan, maupun operasional organisasi. Ekonomis memiliki pengertian bahwa sumber daya *input* hendaknya diperoleh secara hemat yaitu dengan harga yang lebih rendah (*spending less*) atau lebih murah dengan kualitas tertentu. Kehematan harga biasanya diukur dengan harga pasar.

2.2.2. Efisiensi Kinerja Keuangan

Efisiensi adalah berhubungan erat dengan dengan konsep produktiifitas dalam arti berdaya guna dalam penggunaan sumber daya, dimana penggunaan sumber daya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan. Efisiensi merupakan perbandingan *output/Input* yang digunakan dengan kaitan pada standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efisiensi menurut Halim (2008) efisiensi adalah mencerminkan perbandingan antara realisasi pendapatan yang diterima dengan

Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) efisiensi berkaitan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan dengan *input* yang digunakan. Dikatakan efisiensi jika suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang tepat serta dana yang digunakan seminimalmungkin.

Pengukuran efisiensi yang dijelaskan oleh Halim (2008) dan Mardiasmo (2018) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

2.2.3. Efektivitas Kinerja Keuangan

Efektivitas adalah berhubungan dengan tujuan dan sasaran dari target kegiatan (berhasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan atau sasaran (*outcome*) yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Menurut Renyowijoyo (2013) Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Efektivitas hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2012) efektivitas adalah menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin kontribusi *output* yang

dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Pengukuran efektivitas yang dijelaskan oleh Renyowijoyo (2013) dan Abdul Halim (2012) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

2.2.4. Indikator Value For Money

Value For Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi merupakan perbandingan realiasi anggaran (*input*) dengan anggaran pengeluaran (*input value*) yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* (*cost of output*) yang digunakan dengan dikaitkan pada standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan atau sasaran (*outcome*) yang harus tercapai (Mukminati Ridwan, 2017).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan *value for money* pada organisasi sektor publik, yaitu: ekonomis (hemat cermat), efisien (berdaya guna) dan efektif (berhasil guna). Langkah - langkah pengukuran *value for money* adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Ekonomis

Pengukuran ekonomis hanya mempertimbangkan masukan (*input*) yang dipergunakan. Rasio ekonomis dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Sumber: Mardiasmo (2018)

Ketentuan:

Jika $x < 100\%$ berarti ekonomis

Jika $x > 100\%$ berarti tidak ekonomis

Jika $x = 100\%$ berarti seimbang

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibandingkan *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Rasio efisiensi dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Mardiasmo (2018)

Ketentuan:

Jika $x < 100\%$ berarti efisien

Jika $x > 100\%$ berarti tidak efisien

Jika $x = 100\%$ berarti efisiensi seimbang

3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar.

biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Mardiasmo (2018)

Ketentuan:

Jika $x < 100\%$ berarti efektif

Jika $x > 100\%$ berarti tidak efektif

Jika $x = 100\%$ berarti efektivitas seimbang

Indikator *Value For Money* yang dijelaskan oleh (Mukminati Ridwan, 2017) dan (Mardiasmo, 2018) di atas, dapat disimpulkan bahwa tiga indikator *value for money* prestasi organisasi sektor publik akan dirinci sebagai berikut: ekonomi itu mengenai *input*, efisiensi tentang *input* dan *output*, dan efektivitas berhubungan dengan *output* dan *outcome*.

2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tekniks Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
3. Penerimaan Daerah
4. Pengeluaran Daerah
5. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

2.3.1. Fungsi APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tekniks Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD (Anggran Pendapatan Dan Belanja Daerah) mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenan.
2. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenan.
3. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan

pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

4. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
5. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.3.2. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan Daerah.
2. APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
3. Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan undang – undangan.
4. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan

lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

5. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

2.4. Penelitian Terdahulu Tabel

2.1. Penelitian Relevan.

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian dan Hasil Penelitian
1.	<p data-bbox="375 407 847 443">Nama : Maryanti & Munandar,2021</p> <p data-bbox="375 506 1358 591">Judul : Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015 - 2019</p> <p data-bbox="375 609 1358 1404">Hasil : Hasilnya penelitian ditinjau dari tingkat ekonomis adalah bahwa pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 Pemerintah Kota Surabaya berhasil mencapai tingkat ekonomis kinerja antara 80% sampai 90% dengan kriteria cukup ekonomis. Kondisi tahun 2019 meningkat menjadi 92,24% yang berarti tingkat ekonomisnya menurun menjadi kategori kurang ekonomis. Dari segi efisiensi hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kurang efisien pada tahun 2015 dan tahun 2017 dan tidak efisien pada tahun 2016, 2018 dan 2019. Rata-rata tingkat efisiensi selama 5 tahun adalah 101.18% yang artinya masuk kategori tidak efisien. Hasil perhitungan tingkat efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya pada tahun 2015 adalah efektif sebesar 99.65%, sedangkan untuk tahun 2016 sampai dengan 2019 masuk dalam kategori sangat efektif yaitu berkisar antara 100.37% sampai dengan 101.63%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya dapat dikatakan sangat efektif dalam pengelolaan pendapatan dengan tingkat efektivitas rata-rata adalah sebesar 100.88%.</p>
2.	<p data-bbox="375 1422 810 1458">Nama : Sampow & Pangkey, 2022</p> <p data-bbox="375 1476 1358 1561">Judul : Analisis Kinerja Keuangan Dengan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung</p> <p data-bbox="375 1579 1358 2013">Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari rasio ekonomis pada tahun 2016 berada pada 89,89% dikatakan cukup ekonomi dan dikatakan ekonomi pada tahun 2017, 2018, 2019 karena berada pada 96,23%, 93,41%, dan 94,81%. Rasio efisiensi pada tahun 2016-2017 berada pada 91,67% dan 94,27% ini dikategorikan kurang efisiensi dan dikatakan tidak efisien pada tahun 2018-2019 karena berada pada 102,03% dan 101,88%. Rasio efektivitas tahun 2017 berada 106,83% dikatakan sangat efektif dan pada tahun 2016, 2017, dan 2019 berada pada 95,10%, 98,43%, dan 97,39% dikatakan efektif.</p>

Tabel 2.1. Sambungan

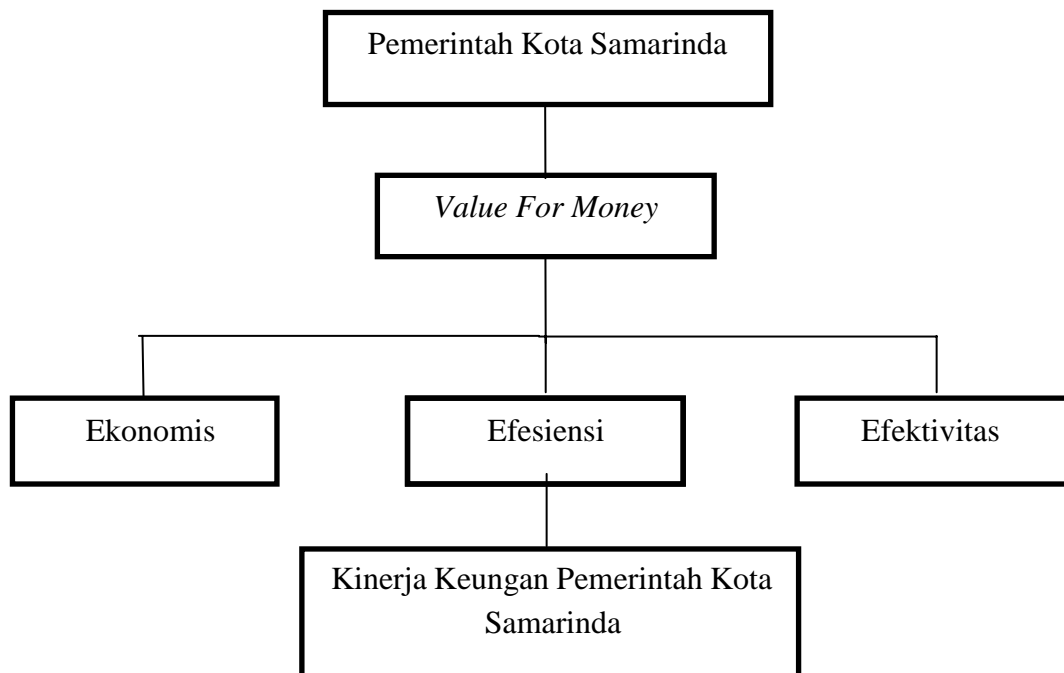
No	Nama Peneliti, Judul Penelitian, dan Hasil Penelitian
3.	<p data-bbox="371 349 847 383">Nama : Yulitiawati & Rusmidarti,2021</p> <p data-bbox="371 398 1358 465">Judul : Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan <i>Value For Money</i> Di Kabupaten OKU</p> <p data-bbox="371 517 1358 745">Hasil : Hasil analisis kriteria ekonomis menunjukkan kategori 90-100% yang artinya dalam pengelolaan anggaran pemerintah kriteria efisiensi dikategorikan kurang efisien yaitu hasil perhitungan lebih dari 90%, sedangkan kriteria efektif kriteria telah terealisasi secara optimal karena hasil perhitungan rasio berada diantara 100%.</p>
4.	<p data-bbox="371 824 687 857">Nama : Rahmawati, 2019</p> <p data-bbox="371 873 1185 958">Judul : Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Dengan Menggunakan prinsip <i>Value For Money</i></p> <p data-bbox="371 974 1358 1395">Hasil : Berdasarkan hasil pengambilan data dan analisa dengan menggunakan <i>value for money</i> yang telah dilakukan, pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2014 – 2018 tercatat memiliki Rasio ekonomis yang tidak stabil namun tetap ekonomis dengan rasio kurang dari 100%, tingkat efisiensi yang baik dengan angka tidakmencapai 100%, dan efektivitas mencapai lebih dari 100%. Hal tersebut terlihat dalam capaian program yang telah dilaksanakan, Program Pendidikan Sekolah Dasar, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dan kegiatan lainnya yang mampu mencapai target di masyarakat</p>
5.	<p data-bbox="371 1417 687 1451">Nama : Ali Sartono,2016</p> <p data-bbox="371 1467 1358 1534">Judul : Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2012 – 2016 Berdasarkan Konsep <i>Value For Money</i></p> <p data-bbox="371 1563 1358 1944">Hasil : Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Magelang Tahun 2012-2016 cukup ekonomis. Pemerintah Daerah Kota Magelang berhasil sukses mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan. Rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja keuangan kurang efisien. Rasio efisiensi memperlihatkan hasil di rentang 90% - 100%. Rasio efektivitas menunjukkan bahwa kinerja keuangan sangat baik. Pemerintah Daerah Kota Magelang telah sukses dalam menentukan target penerimaan, dengan perolehan realisasi pendapatan yang lebih besar daripada anggaran apatannya. Kinerja keuangan secara keseluruhan menunjukkan hasil yang cukup baik</p>

2.5. Rerangka Pemikiran.

Suatu organisasi sektor publik memerlukan adanya pengukuran kinerja untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi. Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tidak hanya berdasarkan pada ukuran finansial saja tetapi juga pada ukuran non-finansial karena tujuan utama organisasi ini bukan memperoleh laba melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja organisasi sektor publik yang bersifat *multidimensional* menyebabkan tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja. Selain itu, *output* yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik umumnya bersifat *intangibile*, sehingga perlu adanya ukuran nonfinansial yang dapat mencerminkan besarnya *output* yang dihasilkan. *Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik. *Value for Money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Pengukuran kinerja dengan metode *Value for Money*, *input*, *output*, dan *outcome* dijadikan sebagai indikator dalam pengukuran kinerja, sehingga dapat diketahui tingkat kinerja ditinjau dari sisi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Samarinda Untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas adapun Rerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan pada model berikut ini:



Gambar 2.1. Rerangka Pemikira.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui studi lapangan, yaitu turun langsung pada subjek penelitian dan melihat proses - proses yang berlangsung pada lapangan. Dalam studi lapangan ini, dokumen dan studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data.

3.1. Defenisi Operasional

Suatu aspek penelitian yang dikenal sebagai definisi operasional menyediakan data atau petunjuk tentang cara mengukur suatu variabel. Dengan bantuan informasi ini, peneliti dapat menentukan cara mengukur variabel berdasarkan konsep yang sama. Oleh karena itu, informasi ilmiah yang dijabarkan dalam bentuk definisi operasional dapat memberikan bantuan kepada peneliti lain yang hendak menjalankan penelitian dengan menggunakan variabel serupa.

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda dengan menggunakan konsep *Value For Money* merupakan pengukuran kinerja yang dilakukan untuk mengetahui seberapa ekonomis, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada setiap periodenya, cara mengukur variable dari penelitian ini adalah:

1. Penilaian kinerja keuangan adalah untuk memperbaiki kinerja keuangan pemerintah, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2. *Value For Money* merupakan pengukuran kinerja yang digunakan pemerintahan daerah yang dapat diukur melalui penilaian ekonomis, efisiensi dan efektivitas dalam pengukuran kinerjanya.
3. Rasio ekonomis adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, untuk pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya.
4. Rasio efisiensi adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase belanja daerah dibagi dengan realisasi pendapatan daerah.
5. Rasio efektivitas adalah pendapatan daerah diukur dengan realisasi pendapatan daerah dengan anggaran pendapatan daerah.

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif data kuantitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kota Samarinda berupa data – data jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah kota samarinda sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis dengan teori yang ada.

Berdasarkan (Sugiyono 2018) Data kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan data konkret, data penelitian berupa angka – angka yang akan diukur menggunakan rumus *Value For Money* sebagai alat uji perhitungan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Penelitian ini akan menjelaskan kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda yang dilakukan berdasarkan metode pengukuran *Value For Money*.

3.3. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Kota Samarinda Jl. Dahlia, Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

3.4. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif menurut sugiyono (2016) adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif penelitian ini berupa data yang dihitung anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada Pemerintahan Kota Samarinda yang berperiode 2017 - 2021

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder menurut Sugiyono (2016) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder penelitian ini adalah data yang berasal dari BPKAD Kota Samarinda yang berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada Pemerintahan Kota Samarinda yang berperiode 2017 – 2021.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen. Teknik dokumen adalah lebih mengarah pada bukti konkret. Dengan instrumen ini, kita diajak untuk menganalisis isi dari dokumen – dokumen yang dapat mendukung penelitian ini (Sujarweni, 2019). Dokumen yang peneliti gunakan yaitu dokumen yang terkait dengan ringkasan laporan realisasi anggaran

pendapatan dan belanja pada Pemerintahan Kota Samarinda yang berperiode 2017 – 2021.

3.6. Alat Analisis Data

Analisis data merupakan proses data yang telah dikumpulkan akan diolah sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan dapat mendukung proses pengambilan keputusan (Elvera et. al, 2021). Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif yaitu untuk menghitung tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas pendapatan dan belanja pada Pemerintahan Kota Samarinda yang berperiode 2017 – 2021. Berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

1. Rasio Ekonomis

Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter (Mukminati Ridwan, 2017). Kinerja Pemerintah Kota Samarinda akan dikatakan sangat ekonomis bila rasionya di bawah 60%, atau jumlah realisasi atas pengeluaran tidak melebihi jumlah anggaran pengeluaran yang ditetapkan. dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Sumber: Mardiasmo (2018)

Untuk mengetahui tingkat rasio ekonomis dari hasil perhitungan menggunakan formula ekonomis adalah klasifikasi pengukuran rasio ekonomis.

Tabel 3.1.
Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis

Presentase	Kriteria
100% Ke atas	Tidak Ekonomis
90% - 100%	Kurang Ekonomis
80% - 90%	Cukup Ekonomis
60% - 80%	Ekonomis
Kurang dari 60%	Sangat Ekonomis

Sumber: Mardiasmo (2018)

2. Rasio Efisiensi

Efisiensi adalah berhubungan dengan besar biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pendapatan pada Pemerintah Kota Samarinda Rumus efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Mardiasmo (2018)

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dari hasil perhitungan menggunakan formula efisiensi adalah klasifikasi pengukuran efisiensi.

Tabel 3.2.
Klasifikasi Pengukuran Rasio Efisiensi

Presentase	Kriteria
100% Ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mardiasmo (2018)

3. Rasio Efektivitas

Keberadaan pendapatan dan belanja pada Pemerintah Kota Samarinda harus ditentukan dari target yang dapat diperolehnya setiap tahun dan ketercapainnya dapat dilihat dalam realisasi yang diperoleh setiap tahun dari Pendapatan tersebut. Dengan demikian untuk menghitung efektivitas penerimaan pendapatan pada Pemerintah Kota Samarinda dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Mardiasmo (2018)

Untuk tingkat efektivitas dari hasil perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel 3.3.
Klasifikasi Pengukuran Rasio Efektivitas

Presentase	Kriteria
100% Ke atas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mardiasmo (2018)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kota Samarinda

Samarinda merupakan ibu kota dari provinsi Kalimantan Timur, Indonesia serta kota dengan penduduk terbesar di seluruh pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk 766.015 jiwa. Samarinda memiliki wilayah seluas km dengan kondisi geografi daerah berbukit dengan ketinggian bervariasi dari 10 sampai 200 meter dari permukaan laut.

Kota Samarinda secara astronomis terletak pada posisi antara $117^{\circ}03'00''$ – $117^{\circ}18'14''$ Bujur Timur dan $00^{\circ}19'02''$ – $00^{\circ}42'34''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah adalah 718 km berdasarkan PP No. 12 Tahun 1987. Suhu minimum berkisar antara 20°C – 34°C dengan curah hujan rata-rata per tahun 1980 mm, sedangkan kelembaban udara rata-rata 85%. Bulan terdingin terjadi pada bulan Januari dan Februari, sedangkan bulan terpanas terjadi pada bulan April dan Oktober. Berikut ini adalah tabel kondisi cuaca rata-rata di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Sungai – sungai yang melintas di Kota Samarinda memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan kota. Sebagai salah satu pusat perekonomian regional terpenting di Kalimantan Timur. Kota Samarinda memiliki posisi dan kedudukan strategis bagi berbagai kegiatan industri. Perdagangan barang dan jasa serta pemukiman yang berwawasan lingkungan dan hijau.

a. Visi Dan Misi Kota Samarinda

Visi Kota Samarinda adalah “ **Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban**”.

Misi Kota Samarinda sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia

Mewujudkan warga kota yang religius, unggul dan berbudaya. Mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) ditopang dengan sumber daya manusia unggul, sehat jasmani dan rohani dalam kehidupan yang harmonis, egaliter serta relasi yang seimbang antar tiga pilar (masyarakat, negara dan swasta).

2. Ekonomi Kota

Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan PAD, berkurangnya angka pengangguran, berkembangnya sector riil di luar pertambangan, munculnya ekonomi kreatif, *start up* dan *market place* di era revolusi industry 4.0.

3. Pemerintahan

Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntable dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.

4. Infrastruktur

Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, modern, nyaman dan ramah lingkungan dalam konsep *smart city* yang dicirikan pemanfaatan teknologi informasi.

5. Lingkungan Kota

Mewujudkan masyarakat religius, mengedepankan nilai – nilai agama dan memegang teguh tradisi dan adat istiadat sebagai warisan leluhur dan identitas bangsa.

b. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda

a) Tugas pokok dan fungsi

1. Tugas pokok utama

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah bidang keuangan meliputi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang membawahi bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan bidang aset daerah.

2. Fungsi

Untuk penyelenggaraan tugas pokok, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda pada pasal 4 Peraturan Walikota Samarinda Nomor Nomor 51 Tahun 2016 mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- 2) Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 3) Pelaksanaan fungsi BUD;
- 4) Penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- 5) Pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- 6) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;
- 7) Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;
- 8) Pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola;
- 9) Pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan Aset daerah;
- 10) Pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
- 11) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- 12) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Visi Dan Misi

1. Visi

Visi dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda adalah "Terwujudnya sistem Administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang profesional kredibel, transparan dan akuntabel secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan dalam perumusan dan pengelolaan kebijakan di bidang keuangan"

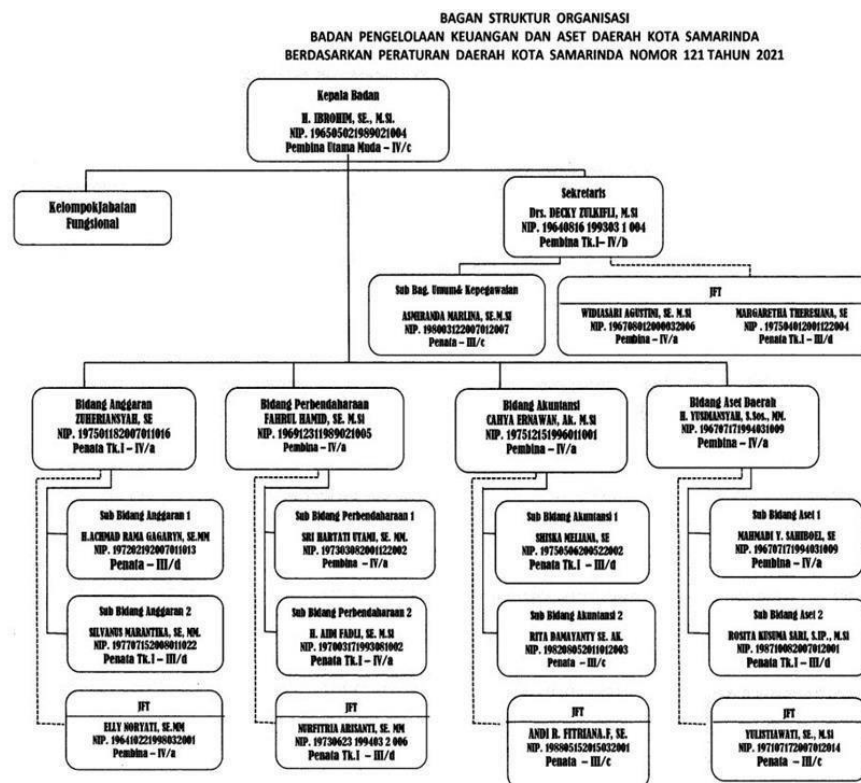
2. Misi

Misi dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional;

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah yang transparan, akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dibidang pengelola keuangan da aset daerah sesuai dengan standar pelayanan.

c) Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda

4.1 Gambar Struktur Organisasi BPKAD

4.2.Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kota Samarinda

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun 2017 – 2021.

Tabel 4.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Samarinda Tahun 2017
(Dalam Rupiah)

Uraian	2017	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan asli daerah	507.247.746.809,00	519.640.806.807,82
Pendapatan transfer dana perimbangan	1.374.596.561.929,00	1.252.076.838.872,00
Pendapatan Transfer Pemerintah daerah	302.225.427.000,00	338.713.381.000,00
Tranfer pemerintah provinsi	178.119.651.739,00	178.119.651.739,00
Lain – lain pendapatan yang sah	1.008.000.000,00	0,00
Jumlah pendapatan	2.363.197.387.477,00	2.288.550.678.418,82
Belanja operasi	1.760.542.464.905,00	1.578.033.675.251,76
Belanja modal	777.802.273.486,00	702.034.572.498,19
Belanja tak terduga	3.000.000.000,00	2.963.437.302,50
Jumlah belanja	2.541.344.738.391,00	2.283.031.685.052,45
Transfer bantuan keuangan	-	-
Penerima pembiayaan	179.155.350.914,00	179.156.846.880,22
Pengeluaran pembiayaan	1.008.000.000,00	0,00
Pembiayaan netto	178.147.350.914,00	179.156.846.880,22
Sisa lebih pembiayaan anggaran	0.00	184.675.840.246,59

Sumber: Laporan Keuangan – PPID Samarinda

Tabel 4.2
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan
Kota Samarinda Tahun 2018
(Dalam Rupiah)

Uraian	2018	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan asli daerah	445.353.498.390,00	498.888.664.159,96
Pendapatan transfer dana perimbangan	1.336.671.561.687,00	1.510.601.699.160,00
Pendapatan transfer pemerintah pusat- lainnya	0,00	0,00
Transfer pemerintah provinsi	607.984.511.739,00	609.058.635.677,00
Lain – lain pendapatan yang sah	122.648.764.593,00	81.757.265.074,81
Jumlah pendapatan	2.542.658.336.409,00	2.700.306.264.071,77
Belanja operasi	1.810.861.869.759,00	1.697.076.492.270,31
Belanja modal	910.768.831.944,00	817.179.025.617,07
Belanja tak terduga	3.000.000.000,00	1.033.828.109,00
Jumlah belanja	2.724.630.701.703,00	2.515.289.345.996,38
Transfer bantuan keuangan	1.903.474.953.,00	1.903.474.953.,00
Penerima pembiayaan	184.675.840.247,00	184.675.840.246,59
Pengeluaran pembiayaan	800.000.000,00	792.000.000,00
Pembiayaan netto	183.875.840.247,00	183.883.840.246,59
Sisa lebih pembiayaan anggaran	0.00	336.997.283.368,98

Sumber: Laporan Keuangan – PPID Samarinda

Tabel 4.3
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan
Kota Samarinda Tahun 2019
(Dalam Rupiah)

Uraian	2019	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan asli daerah	500.99.118.323,22	560.444.857.362,80
Pendapatan transfer dana perimbangan	1.533.540.322.740,00	1.804.428.094.452,00
Pendapatan transfer pemerintah pusat- lainnya	30.087.063.000,00	30.087.063.000,00
Tranfer pemerintah provinsi	900.298.826.067,78	867.910.760.453,78
Lain – lain pendapatan yang sah	99.410.000.000,00	82.649.720.000,00
Jumlah pendapatan	3.064.327.330.131,00	3.345.520.495.268,58
Belanja operasi	2.063.362.673.424,00	1.856.744.865.508,63
Belanja modal	1.360.933.408.331,00	1.206.777.043.102,26
Belanja tak terduga	5.000.000.000,00	1.693.960.756,00
Jumlah belanja	3.429.356.081.755,00	3.065.215.869.366,89
Transfer bantuan keuangan	1.968.531.745,00	1.968.531.745,00
Penerima pembiayaan	366.997.283.369,00	366.997.283.368,98
Pengeluaran pembiayaan	0.00	0.00
Pembiayaan netto	366.997.283.369,00	366.997.283.368,98
Sisa lebih pembiayaan anggaran	0.00	645.333.377.525,67

Sumber: Laporan Keuangan – PPID Samarinda

Tabel 4.4
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan
Kota Samarinda Tahun 2020
(Dalam Rupiah)

Uraian	2020	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan asli daerah	392.727.879.000,00	485.189.493.721,33
Pendapatan transfer dana perimbangan	1.332.435.970.400,00	1.530.119.937.719,00
Pendapatan transfer pemerintah pusat- lainnya	35.336.461.000,00	35.336.461.000,00
Transfer pemerintah provinsi	729.383.096.000,00	725.889.397.483,00
Lain – lain pendapatan yang sah	102.935.723.000,00	96.300.745.000,00
Jumlah pendapatan	2.592.819.129.400,00	2.872.836.034.923,33
Belanja operasi	1.941.877.842.303,00	1.816.178.901.099,31
Belanja modal	1.190.256.536.647,00	1.066.113.143.021,66
Belanja tak terduga	103.919.482.000,00	93.794.421.718,39
Jumlah belanja	3.236.053.860.950,00	2.976.086.465.839,36
Transfer bantuan keuangan	2.098.646.000,00	2.098.645.335,00
Penerima pembiayaan	645.333.377.550,00	645.333.377.525,67
Pengeluaran pembiayaan	0,00	0,00
Pembiayaan netto	645.333.377.550,00	645.333.377.525,67
Sisa lebih pembiayaan anggaran	0,00	539.984.301.274,64

Sumber: Laporan Keuangan – PPID Samarinda

Tabel 4.5
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan
Kota Samarinda Tahun 2021
(Dalam Rupiah)

Uraian	2021	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan asli daerah	561.492.908.215,00	573.726.380.356,71
Pendapatan transfer pemerintah pusat	1.319.215.964.294,00	1.351.808.166.281,00
Tranfer pemerintah antar daerah	807.994.896.900,00	819.358.103.309,00
Lain – lain pendapatan yang sah	88.842.800.000,00	115.441.304.576,00
Belanja operasi	2.084.185.927.103,00	1.911.082.455.467,70
Belanja modal	1.120.255.347.491,00	1.007.524.414.721,03
Belanja tak terduga	113.089.596.090,00	81.373.689.241,99
Jumlah belanja	3.317.530.870.684,00	3.069.980.559.430,72
Penerima pembiayaan	539.984.301.275,00	539.983.776.274,64
Pembiayaan netto	539.984.301.275,00	539.983.776.274,64
Sisa lebih pembiayaan anggaran	0,00	330.337.121.366,63

Sumber: Laporan Keuangan – PPID Samarinda

4.3. Analisis Data

a. Analisis Ekonomis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarinda

Ditetapkannya otonomi daerah menurut pemda agar mampu mengatur keuangan wilayah otonomnya dengan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi biaya kebutuhan daerahnya disertai pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pengukuran tingkat ekonomis kinerja keuangan pemerintah kota samarinda. Kinerja Pemerintah Kota Samarinda akan dikatakan sangat ekonomis bila rasionya di bawah 60%, atau jumlah realisasi atas pengeluaran tidak melebihi jumlah anggaran pengeluaran yang ditetapkan. dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Sumber: Mardiasmo (2018)

1. Penilaian ekonomis tahun 2017:

$$\begin{aligned} \text{Ekonomis} &= \frac{2.283.031.685.052,45}{2.541.344.738.391,00} \times 100\% \\ &= 89,84\% \end{aligned}$$

2. Penilaian ekonomis tahun 2018:

$$\begin{aligned} \text{Ekonomis} &= \frac{2.515.289.345.996,38}{2.724.630.701.703,00} \times 100\% \\ &= 92,32\% \end{aligned}$$

3. Penilaian ekonomis tahun 2019:

$$\begin{aligned} \text{Ekonomis} &= \frac{3.065.215.869.366,89}{3.429.356.081.755,00} \times 100\% \\ &= 89,38\% \end{aligned}$$

4. Penilaian ekonomis tahun 2020:

$$\begin{aligned} \text{Ekonomis} &= \frac{2.976.086.465.839,36}{3.236.053.860.950,00} \times 100\% \\ &= 91,97\% \end{aligned}$$

5. Penilaian ekonomis tahun 2021:

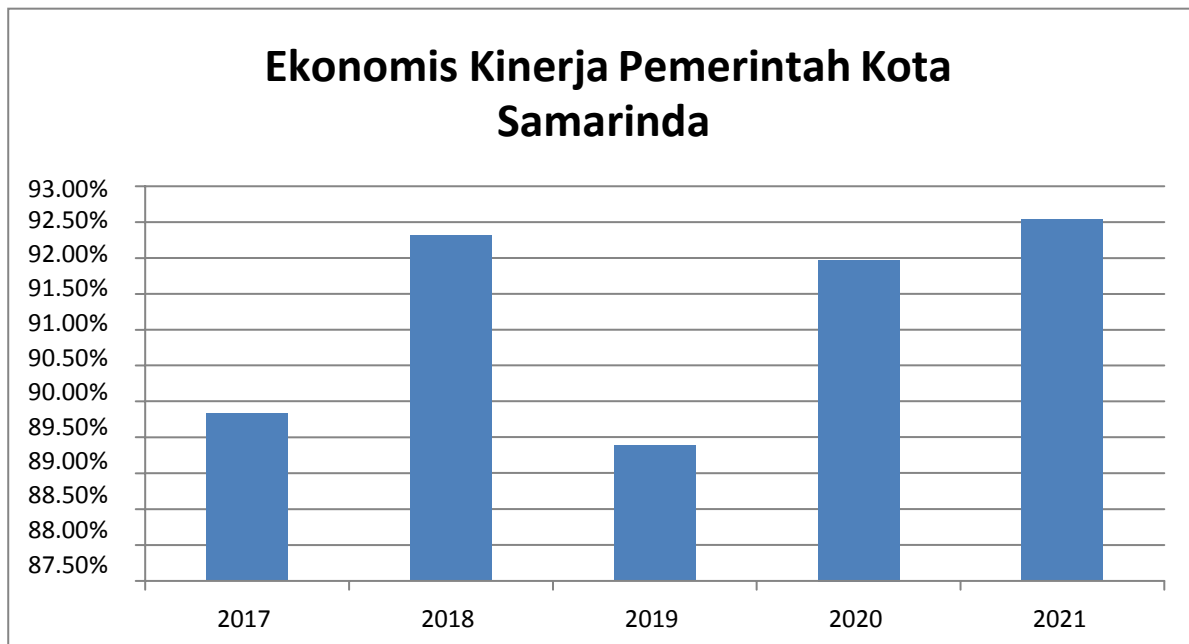
$$\text{Ekonomis} = \frac{3.069.980.559.430,72}{3.317.530.870.684,00} \times 100\%$$

**Tabel 4.6. Pengukuran Ekonomi Kinerja Keuangan Pemkot Samarinda
Tahun 2017 – 2021
(Dalam Rupiah)**

Tahun	Realisasi Pengeluaran	Anggaran Pengeluaran	%	Kategori
2017	2.283.031.685.052,45	2.541.344.738.391,00	89,84	Cukup ekonomis
2018	2.515.289.345.996,38	2.724.630.701.703,00	92,32	Kurang ekonomis
2019	3.065.215.869.366,89	3.429.356.081.755,00	89,38	Cukup ekonomis
2020	2.976.086.465.839,36	3.236.053.860.950,00	91,97	Kurang ekonomis
2021	3.069.980.559.430,72	3.317.530.870.684,00	92,54	Kurang ekonomis

Sumber: Laporan Keuangan – PPID Samarinda

Adapun grafik dari hasil perhitungan indeks ekonomis pada tahun 2017-2021 di Pemerintahan Kota Samarinda dapat dilihat pada gambar 4.2 di bawah ini.



Sumber: Data olahan (2023)

Gambar 4.2 Rasio Ekonomis Pemerintah Kota Samarinda

Dilihat dari tabel 4.6, selama periode 5 tahun, Pemerintah Kota Samarinda memiliki perubahan dalam rasio ekonomis. Pada tahun 2017, rasio ekonomis mencapai 89,84%, berada dalam kategori cukup ekonomis karena berada di antara 80% dan 90%. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan menjadi 92,32%, yang masuk dalam kategori kurang ekonomis karena berada di antara 90% dan 100%. Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 89,38%, tetapi masih tergolong cukup ekonomis karena berada di antara 80% dan 90%. Pada tahun 2020, rasio ekonomis meningkat menjadi 91,97%, masuk dalam kategori kurang ekonomis karena berada di antara 90% dan 100%. Pada tahun 2021, terjadi kenaikan lagi menjadi 92,54%, yang masih termasuk dalam kategori kurang ekonomis karena berada di antara 90% dan 100%.

Dalam kondisi ini mencerminkan fluktuasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda dalam rasio ekonomis, yang mengalami naik turun. Meskipun demikian, performa keuangan Pemerintah Kota Samarinda selama 5 tahun lebih cenderung meningkat tetapi tergolong dalam kategori kurang ekonomis. Ini menandakan bahwa dari tahun 2017 hingga 2021, Pemerintah Kota Samarinda tidak berhasil melakukan

Penghematan anggaran belanja daerah.

Rasio ekonomis sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Dengan semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. (Mahsun, 2016). Rasio ekonomis terkait sejauh mana organisasi sector publik meminimalisir *input resource* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Halim et al., 2014).

b. Pengukuran Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarinda

Pengukuran selanjutnya adalah efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan membandingkan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. Cara mengukur tingkat atas pendapatan yang diterima daerah. Pengukuran tingkat efisiensi performa keuangan Pemerintah Kota Samarinda akan diukur dengan rumus efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Mardiasmo (2018)

1. Penilaian efisiensi tahun 2017:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{2.283.031.685.057,45}{2.363.197.387.477,00} \times 100\% \\ &= 96,60\% \end{aligned}$$

2. Penilaian efisiensi tahun 2018:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{2.515.289.345.996,38}{2.542.658.336.409,00} \times 100\% \\ &= 98,92\% \end{aligned}$$

3. Penilaian efisiensi tahun 2019:

$$Efisiensi = \frac{3.065.215.869.366,89}{3.064.327.330.131,00} \times 100\%$$

$$= 100,02\%$$

4. Penilaian efisiensi tahun 2020:

$$Efisiensi = \frac{2.976.086.465.839,36}{2.592.819.129.400,00} \times 100\%$$

$$= 114,78\%$$

5. Penilaian efisiensi tahun 2021:

$$Efisiensi = \frac{3.069.980.559.430,72}{2.777.546.569.409,00} \times 100\%$$

$$= 110,52\%$$

Tabel 4.7. Pengukuran Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017 – 2021 (Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Pengeluaran	Anggaran Pendapatan	%	Kategori
2017	2.283.031.685.057,45	2.363.197.387.477,00	96,60	Kurang efisien
2018	2.515.289.345.996,38	2.542.658.336.409,00	98,92	Kurang efisien
2019	3.065.215.869.366,89	3.064.327.330.131,00	100,02	Tidak efisien
2020	2.976.086.465.839,36	2.592.819.129.400,00	114,78	Tidak efisien
2021	3.069.980.559.430,72	2.777.546.569.409,00	110,52	Tidak efisien

Sumber: Laporan Keuangan – PPID Samarinda

Adapun grafik dari hasil perhitungan indeks efisiensi pada tahun 2017-2021 di

Pemerintahan Kota Samarinda dapat dilihat pada gambar 4.3 di bawah ini.



Sumber: Data olahan (2023)

Gambar 4.3 Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Samarinda

Dari tabel 4.7, dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda dari tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan tingkat kurang efisiensi dan tidak efisiensi. Pada tahun 2017, rasio efisiensi sebesar 96,60%, masuk dalam kategori kurang efisien karena berada di antara 90% dan 100%. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan menjadi 98,92%, tetapi masih tergolong kurang efisien karena berada di antara 90% dan 100%. Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 100,02%, yang

termasuk dalam kategori tidak efisien. Pada tahun 2020, rasio efisiensi meningkat menjadi 114,78%, masuk dalam kategori tidak efisien, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 110,52%, tetapi masih termasuk dalam kategori tidak efisien. Ini menunjukkan bahwa dalam melakukan belanja daerah untuk memperoleh pendapatan

daerah, Pemerintah Kota Samarinda mengalami penurunan kinerja dari tahun 2017 hingga 2021, mengalami penurunan, hal ini tidak baik bagi Pemerintah Kota Samarinda.

Penurunannya disebabkan karena terjadi peningkatan belanja daerah pemerintah kota samarinda. Misalnya belanja barang dan jasa, belanja gedung dan bangunan, dan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.

Menurut Mardiasmo (2018), Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda dalam rasio efisiensi dinyatakan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

c. Pengukuran Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarinda

Dalam analisis efektivitas performa keuangan pemerintah daerah akan dijelaskan tingkat kinerja keuangan daerah dengan cara merasiokan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Dengan demikian untuk menghitung efektivitas penerimaan pendapatan pada Pemerintah Kota Samarinda dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Mardiasmo (2018)

1. Penilaian efektivitas tahun 2017:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{2.288.550.678.418,82}{2.363.197.387.477,00} \times 100\% \\ &= 96,84\% \end{aligned}$$

2. Penilaian efektivitas tahun 2018:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{2.700.306.264.071,77}{2.542.658.336.409,00} \times 100\% \\ &= 106,20\% \end{aligned}$$

3. Penilaian efektivitas tahun 2019:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{3.345.520.495.268,58}{3.064.327.330.131,00} \times 100\% \\ &= 109,18\% \end{aligned}$$

4. Penilaian efektivitas tahun 2020:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{2.872.836.034.923,33}{2.592.819.129.400,00} \times 100\% \\ &= 110,80\% \end{aligned}$$

5. Penilaian efektivitas tahun 2021:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{2.860.333.904.522,71}{2.777.546.569.409,00} \times 100\% \\ &= 102,98\% \end{aligned}$$

Tabel 4.8. Pengukuran Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2017 – 2021 (Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	%	Kategori
2017	2.288.550.678.418,82	2.363.197.387.477,00	96,84	Efektif
2018	2.700.306.264.071,77	2.542.658.336.409,00	106,20	Sangat efektif
2019	3.345.520.495.268,58	3.064.327.330.131,00	109,18	Sangat efektif
2020	2.872.836.034.923,33	2.592.819.129.400,00	110,80	Sangat efektif
2021	2.860.333.904.522,71	2.777.546.569.409,00	102,98	Sangat efektif

Sumber: Laporan Keuangan – PPID Samarinda

Adapun grafik dari hasil perhitungan indeks efektivitas pada tahun 2017-2021 di

Pemerintahan Kota Samarinda dapat dilihat pada gambar 4.4 di bawah ini.



Sumber: Data olahan (2023)

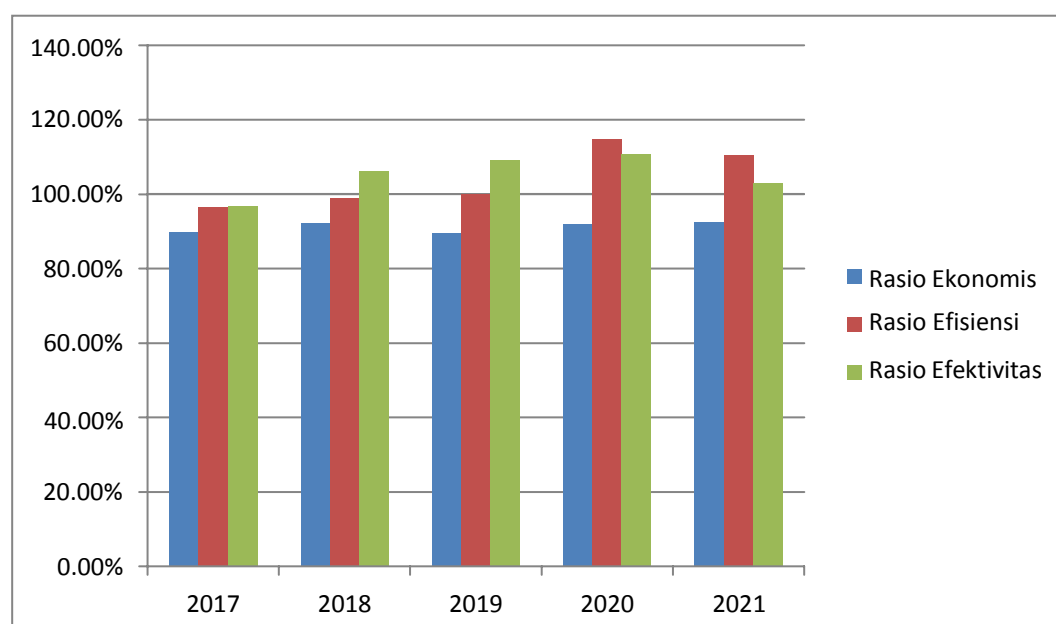
Gambar 4.4 Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Samarinda

Dari tabel 4.8, terlihat bahwa tingkat efektivitas kinerja Pemerintah Kota Samarinda dari tahun 2017 hingga 2021 dapat dikategorikan sebagai efektif dan sangat efektif. Pada tahun 2017, rasio efektivitas mencapai 96,84%, masuk dalam kategori efektif karena berada di antara 90% dan 100%. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan menjadi 106,20%, termasuk dalam kategori sangat efektif karena melebihi 100%. Pada tahun 2019, rasio efektivitas terus meningkat menjadi 109,18%, juga masuk dalam kategori sangat efektif karena berada di atas 100%. Tahun 2020 menunjukkan peningkatan efektivitas menjadi 110,80%, kategori sangat efektif karena berada di atas 100%. Meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 102,98%, namun masih termasuk dalam kategori sangat efektif karena melebihi 100%. Ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda dapat dianggap sangat efektif dalam mengelola pendapatan, dengan tingkat efektivitas rata-rata melebihi 100% selama periode 5 tahun dari 2017 hingga 2021.

Menurut Mardiasmo (2018), yang menyatakan bahwa untuk rasio efektivitas merupakan tingkat dari pencapaian atas hasil program dengan target yang ditetapkan.

Menurut Renyowijoyo (2013) Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Efektivitas hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatannya.

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda dengan metode *Value For Money* yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas peningkatan dan penurunan dapat dilihat grafik di bawah ini:



Sumber: Data olahan (2023)

Gambar 4.5 Hasil pengukuran *value of money*

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa rasio ekonomis untuk biaya pembelanjaan daerah mengalami kurang ekonomis, sedangkan untuk tingkat efisiensi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda dalam melakukan belanja daerah untuk memperoleh pendapatan daerah untuk tahun 2017 – 2021 mengalami penurunan, dan untuk tingkat efektivitas ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota

Samarinda dapat dikatakan sangat efektif dalam pengelolaan pendapatan dengan tingkat efektivitas rata – rata adalah di atas 100%.

4.4. Pembahasan

Berikut ini adalah hasil perhitungan mengenai tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Samarinda:

Tabel 4.9
Pengukuran tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas
Anggaran pendapatan dan belanja daerah
Pemerintah Kota Samarinda
Tahun 2019 – 2021
(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio ekonomi	89,84%	92,32%	89,38%	91,97%	92,54%
Kategori	Cukup ekonomis	Kurang ekonomis	Cukup ekonomis	Kurang ekonomis	Kurang ekonomis
Rasio efisiensi	96,60%	98,92%	100,02%	114,78%	110,52%
Kategori	Kurang efisien	Kurang efisiensi	Tidak efisien	Tidak efisien	Tidak efisien
Rasio efektivitas	96,84%	106,20%	109,18%	110,80%	102,98%
Kategori	Efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif

Sumber: Laporan Keuangan – PPID Samarinda

4.4.1. Tinjauan Secara Ekonomis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarinda

Tinjauan secara ekonomis Pemerintah Kota Samarinda diukur selama 5 tahun. Pada tahun 2017, rasio ekonomis mencapai 89,84%, yang masuk dalam kategori cukup ekonomis karena berada di antara 80% dan 90%. Tahun berikutnya, pada tahun 2018, rasio ekonomis meningkat menjadi 92,32%, yang masuk dalam kategori kurang ekonomis karena berada di antara 90% dan 100%. Namun, pada tahun 2019, rasio ekonomis mengalami penurunan menjadi 89,38%, meskipun masih tetap dalam kategori cukup

ekonomis 80% hingga 90%. Pada tahun 2020, rasio ekonomi kembali meningkat menjadi 91,97%, yang termasuk dalam kategori kurang ekonomis 90% hingga 100%, dan pada tahun 2021, rasio ekonomis naik lagi menjadi 92,54%, juga termasuk dalam kategori kurang ekonomis 90% hingga 100%.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda dalam rasio ekonomis mengalami fluktuasi antara kenaikan dan penurunan. Meskipun demikian, jika dilihat dari rentang waktu 5 tahun, kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda cenderung mengalami penurunan dan dikategorikan sebagai kurang ekonomis. Ini menandakan bahwa dari tahun 2017 hingga 2021, Pemerintah Kota Samarinda menghadapi kesulitan dalam melakukan penghematan belanja daerah karena terjadi peningkatan belanja daerah pemerintah kota Samarinda. Terjadi peningkatan belanja daerah tersebut adalah belanja barang dan jasa, belanja gedung dan bangunan, dan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.

Menurut Mahmudi (2015) pengertian ekonomis yaitu kaitannya dengan penggunaan *input primer* (anggaran atau kas) menjadi *input reguler* (tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal) yang dikonsumsi organisasi untuk melaksanakan kegiatan operasional. Dalam rancangan ekonomis diharapkan organisasi sektor publik tidak melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan, maupun operasional organisasi. Tujuan dari pengukuran ekonomis adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja Pemerintah Kota Samarinda dalam mendapatkan dan mengelola sumber daya (*input*) secara efektif, menghindari pemborosan, dan meningkatkan produktivitas pengeluaran.

4.4.2. Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarinda

Efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda yang diukur selama periode 5 tahun (2017 – 2021), seperti yang tercantum dalam Tabel 4.9, menunjukkan

bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami ketidakefisienan. Pada tahun 2017, rasio efisiensi sebesar 96,60%, yang termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada di antara 90% dan 100%. Tahun berikutnya, pada tahun 2018, rasio efisiensi meningkat menjadi 98,92%, tetapi masih termasuk dalam kategori kurang efisien. Pada tahun 2019, rasio efisiensi bahkan mencapai 100,02%, yang masuk dalam kategori tidak efisien. Pada tahun 2020, rasio efisiensi meningkat drastis menjadi 114,78%, juga termasuk dalam kategori tidak efisien. Sementara itu, pada tahun 2021, rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 110,52%, tetapi tetap masuk dalam kategori tidak efisien.

Berdasarkan penjelasan di atas, ketidakefisienan dalam anggaran disebabkan oleh terjadi peningkatan belanja yang terjadi di sektor-sektor tertentu, seperti belanja barang dan jasa, belanja gedung dan bangunan, serta belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. Besarnya selisih antara realisasi anggaran belanja dan realisasi pendapatan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan masih sangat kurang efisien, tanpa mempertimbangkan penghematan dan efisiensi pengeluaran anggaran daerah. Keberhasilan pemerintah dalam mencapai target anggaran belanja tidak memiliki arti yang signifikan jika biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target tersebut lebih besar daripada pendapatan yang diterima.

Menurut Mardiasmo (2018) efisiensi berkaitan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan dengan *input* yang digunakan. Dikatakan efisiensi jika suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang tepat serta dana yang digunakan seminimal mungkin.

4.4.3. Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Samarinda

Efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda yang diukur selama periode 5 tahun (2017 – 2021), sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.9, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Samarinda dari tahun 2017 hingga 2021 dapat dikategorikan sebagai efektif dan sangat efektif. Pada tahun 2017, rasio efektivitas mencapai 96,84%, yang termasuk dalam kategori efektif karena berada di antara 90% dan 100%. Tahun berikutnya, pada tahun 2018, rasio efektivitas meningkat menjadi 106,20%, yang termasuk dalam kategori sangat efektif karena melebihi 100%. Pada tahun 2019, rasio efektivitas terus meningkat menjadi 109,18%, yang juga termasuk dalam kategori sangat efektif karena berada di atas 100%. Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 110,80%, tetapi masih termasuk dalam kategori sangat efektif karena di atas 100%. Tahun 2021 mengalami penurunan hingga mencapai 102,98%, namun tetap termasuk dalam kategori sangat efektif karena berada di atas 100%.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengukuran efektivitas adalah sebuah rasio yang mencerminkan dampak (*outcome*) dari program terhadap hasil (*output*) dalam mencapai tujuan program. Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Semakin besar *output* yang dihasilkan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda dapat dianggap sangat efektif dalam pengelolaan pendapatan, dengan tingkat efektivitas rata-rata melebihi 100% selama periode 5 tahun dari tahun 2017 hingga 2021.

Menurut Abdul Halim (2012) efektivitas adalah menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin kontribusi *output* yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Maryanti dan Munandar, (2023) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Surabaya pada tahun 2015 - 2019 berdasarkan pengukuran ekonomis adalah kurang melakukan penghematan anggaran belanja daerah, pengukuran efisiensi adalah terjadinya tidak efisien dikarenakan peningkatan belanja daerah di sektor belanja barang dan jasa, dan pengukuran efektivitas masuk dalam kriteria efektif. Keadaan ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kota Surabaya sudah memiliki kinerja keuangan yang efektif.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak dari tempat dan waktu penelitian, dan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah, persamaanya adalah dengan menggunakan konsep *Value For Money* dan hasil penelitiannya sama.

BAB V

PENUTUPAN

5.1. Simpulan

Simpulan yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah:

1. Tinjauan ekonomis kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda selama periode tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan fluktuasi, tetapi secara keseluruhan, mengindikasikan manajemen keuangan daerah yang tidak meningkat karena dari kategori cukup ekonomis menjadi kategori kurang ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda tidak berhasil melakukan penghematan dalam pengeluaran pemerintah daerah pada periode 2017 hingga 2021.
2. Efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kota samarinda, menunjukan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan karena besarnya belanja yang dikeluarkan Pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Kota Samarinda. Penurunannya disebabkan karena terjadi peningkatan belanja daerah pemerintah kota samarinda. Misalnya belanja barang dan jasa, belanja gedung dan bangunan, dan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.
3. Efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2017 – 2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan pendapatan daerah Pemerintah Kota Samarinda di tahun 2017 sampai 2020 dan penurunan berada di tahun 2021 tapi berdasarkan pengukuran efektivitas pendapatan daerah Pemerintah Kota Samarinda berada dikategori sangat efektif. Hal ini menunjukan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda dalam pendapatan daerah telah mencapai target yang ditetapkan.

5.2. Saran

Saran yang penulis sampaikan untuk pertumbuhan ekonomi serta pengelolaan kinerja keuangan Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Samarinda

Harapannya instansi terkait dapat lebih memperhatikan optimalisasi penggunaan anggaran belanja daerah yang belum maksimal dan melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan anggaran belanja yang berlebihan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pemborosan dana yang melebihi batas yang telah ditetapkan dan mencapai tingkat efisiensi yang lebih baik dalam penggunaan anggaran tersebut. Dengan demikian, penggunaan dana yang diberikan oleh negara dapat menjadi lebih akurat dan menghindari penggunaan berlebihan untuk menjalankan program-program tertentu..

2. Bagi Masyarakat

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah dengan menggunakan metode *Value for Money* dapat meningkatkan keyakinan masyarakat melalui peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, diharapkan untuk melakukan pengukuran kinerja tidak hanya diukur dengan konsep *Value For Money* saja, tetapi juga dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah sehingga hasil penelitian menunjukkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. (ISBN 978 - 979 - 061 - 227 - 3).
- Ali Sartono. (2016). *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2012 – 2016 Berdasarkan Konsep Value For Money*. 154115377, 1–95
- Elvera & Yesita Astarina. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi. (ISBN 978 - 623 - 01 - 1895 - 1).
- Fahmi Irham. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta. Firma
- Sulistiyowati. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE
- Haryoko, I., & Juliastuti. (2016). *Analisis efektivitas penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota parepare di kota parepare*. 4(march 2014), 46–54.
- Halim, A., & Kusufi, M. Syam. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ke-2. Jakarta: Salemba Empat. (ISBN 978 – 979 – 061 – 500 – 7).
- Halim, A. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Islahuzzaman. 2012. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonusa.
- Kurnia, Sri. (2016). “*Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dengan Menggunakan Metode Value for Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang*.” Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahmudi. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press
- Mukminati Ridwan, A. (2017). *Konsep Value for Money: Alternatif Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Luwu Timur*. *Assets*, 7.
- Mardiasmo (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi (ISBN 978 – 979 – 29 – 6972 – 6).
- Mahmudi (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Pre
- Mahmudi (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muindro Renyowijoyo (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 3. Jakarta. Mitra Wacana Media.

- Maryanti, C. S., & Munandar, A. (2021). Analisis value for money untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota surabaya tahun anggaran 2015-2019 jimea | jurnal ilmiah mea (manajemen , ekonomi , dan akuntansi). *Jimea / jurnal ilmiah mea (manajemen, ekonomi, dan akuntansi)*, 5(3), 2886–2899.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tekniks Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rahmawati, S. I. (2019). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Dengan Menggunakan Prinsip Value for Money. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 1–16.
- Sucipto. 2007. *Penilaian Kinerja Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Sampow, R., & Pangkey, R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(2), 261–271. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.2755>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung:PT Alfabet.
- Sujarweni.V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Surjarweni V Wiratna. (2019). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah Menjadi Tonggak Dimulainya Otonomi Daerah.
- Yulitiawati, Y., & Rusmidarti, R. (2021). Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Di Kabupaten OKU. *Jetap*, 91–109. <http://journal.unbara.ac.id/index.php/etap/article/view/966%0Ahttps://journal.unbara.ac.id/index.php/etap/article/download/966/640>
- Zakia Arsiandi. (2016). *Anausis pengukuran kinerja pelaksanaan anggaranbelanjadengan[Muhammadiyah]*.<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1334/1/SKRIPSI1135-1711297901.pdf>

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota
 SAMARINDA

Kode Pos 7512

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : **UNMUL**
FAKULTAS Ekonomi dan bisnis

Diterima Tgl : **31-10-2023**

No. Agenda : **1999**

No. Surat : **2843 /UN17.1/PL/2023**

Sifat :

Perihal :

Beri Tanda Centang

Sgt Segera

Segera

Rahasia

Biasa

Penyusunan skripsi mahasiswa
An. Ahmad Ali Sombili

Diteruskan Kepada :

Sekretariat :

Ka. Bidang

Sekretaris
 Kasub. Bag. Umum
 Kasub. Bag. Keuangan
 Kasub. Bag. Program

✓

Anggaran
 Perbendaharaan & Verifikasi
 Akuntansi
 Peralatan & Perlengkapan
 Aset Daerah

✓

*DISESUAIKAN SESUAI
 ARAHAN 21/11/2023*

Catatan :

Proses sesuai ketentuan
13/11/23



WALIKOTA SAMARINDA


PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Audited)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2017	SALDO AUDITED 2017	(%)	SALDO AUDITED 2016
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	262.781.200.000,00	298.972.840.769,93	113,77	256.130.052.909,60
Pendapatan Retribusi Daerah	67.832.877.000,00	52.123.941.557,00	76,84	58.591.942.122,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000,00	5.057.498.908,46	72,25	4.359.741.392,02
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	169.633.669.809,00	163.486.525.572,43	96,38	72.322.556.867,35
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	507.247.746.809,00	519.640.306.807,82	102,44	391.404.293.290,97
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT				
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	452.752.904.929,00	359.925.240.273,00	79,50	695.992.672.611,00
Dana Bagi Hasil Pajak	127.709.284.600,00	100.730.525.248,00	78,87	117.725.133.664,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	325.043.620.329,00	259.194.715.025,00	79,74	578.267.538.947,00
Dana Alokasi Umum	653.465.507.000,00	653.465.507.000,00	100,00	665.150.055.000,00
Dana Alokasi Umum	653.465.507.000,00	653.465.507.000,00	100,00	665.150.055.000,00
Dana Alokasi Khusus	268.378.150.000,00	238.686.091.599,00	88,94	256.822.575.487,00
Dana Alokasi Khusus	268.378.150.000,00	238.686.091.599,00	88,94	256.822.575.487,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.374.596.561.929,00	1.252.076.838.872,00	91,09	1.617.965.303.098,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH- LAINNYA				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	302.225.427.000,00	338.713.381.000,00	112,07	188.523.970.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	302.225.427.000,00	338.713.381.000,00	112,07	188.523.970.000,00
BANTUAN KEUANGAN				
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	178.119.651.739,00	178.119.651.739,00	100,00	234.733.083.000,00
Jumlah Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pem Provinsi	178.119.651.739,00	178.119.651.739,00	100,00	234.733.083.000,00
Jumlah Pendapatan transfer	1.854.941.640.668,00	1.768.909.871.611,00	95,36	2.046.222.356.098,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	1.008.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.008.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	2.363.197.387.477,00	2.288.550.678.418,82	96,84	2.437.626.649.388,97
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	1.011.594.994.553,00	931.254.208.717,18	92,06	1.016.852.128.034,57
Belanja Barang dan Jasa	730.264.446.302,00	618.903.996.820,58	84,75	584.913.260.321,64
Belanja Hibah	17.289.864.100,00	26.678.063.049,00	154,30	31.691.725.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.393.159.950,00	1.197.406.665,00	85,95	1.659.592.935,00
Jumlah Belanja Operasi	1.760.542.464.905,00	1.578.033.675.251,76	89,63	1.635.116.706.291,21

URAIAN	ANGGARAN 2017	SALDO AUDITED 2017	(%)	SALDO AUDITED 2016
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	10.421.287.500,00	6.424.204.345,00	61,65	7.750.309.710,00
Belanja Peralatan dan Mesin	24.448.468.140,00	18.343.774.741,00	75,03	36.543.957.650,43
Belanja Gedung dan Bangunan	203.393.834.986,00	182.569.370.905,00	89,76	124.470.965.823,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	530.176.365.110,00	472.609.691.881,00	89,14	507.731.165.309,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	607.252.750,00	573.010.300,00	94,36	2.624.206.372,00
Belanja Modal Dana Bos	8.755.065.000,00	21.514.520.326,19	245,74	16.616.571.855,00
Jumlah Belanja Modal	777.892.273.486,00	792.034.572.498,19	90,26	695.737.176.719,43
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	2.963.437.302,50	98,78	1.075.015.572,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	2.963.437.302,50	98,78	1.075.015.572,00
JUMLAH BELANJA	2.541.344.738.391,00	2.283.031.685.052,45	89,84	2.331.928.898.582,64
Surplus/(Defisit)	(178.147.350.914,00)	5.518.993.366,37	(3,10)	105.697.750.806,33
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)	179.155.350.914,00	179.156.846.880,22	100,00	73.457.600.107,89
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan	179.155.350.914,00	179.156.846.880,22	100,00	73.457.600.107,89
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.008.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran	1.008.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETO	178.147.350.914,00	179.156.846.880,22	100,57	73.457.600.107,89
SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	184.675.840.246,59	0,00	179.155.350.914,22

Samarinda, Mei 2018
Pjs. Walikota Samarinda


DR. Ir. H. Zairin Zain, M.Si



WALIKOTA SAMARINDA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Audited)

(dalam satuan rupiah)

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
3	Pendapatan Pajak Daerah	309.979.500.000,00	352.827.149.153,44	113,82	298.972.840.769,93
4	Pendapatan Retribusi Daerah	61.314.172.500,00	48.480.939.558,00	79,07	52.123.941.557,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.979.756.081,00	11.707.898.396,97	97,73	5.057.498.908,46
6	Lain-lain PAD Yang Sah	62.080.069.809,00	85.872.677.051,55	138,33	163.486.525.572,43
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	445.353.498.390,00	498.888.664.159,96	112,02	519.640.806.807,82
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
10	Bagi Hasil Pajak	120.239.317.000,00	93.507.456.251,00	77,77	100.730.525.248,00
11	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	344.802.218.687,00	523.611.508.712,00	151,86	259.194.715.025,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	659.322.535.000,00	659.322.535.000,00	100,00	653.465.507.000,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK)	242.307.491.000,00	234.160.199.197,00	96,64	238.686.091.599,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.366.671.561.687,00	1.510.601.699.160,00	110,53	1.252.076.838.872,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
16	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	399.501.058.000,00	400.575.181.938,00	100,27	338.713.381.000,00
20	Bantuan Keuangan				
21	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	208.483.453.739,00	208.483.453.739,00	100,00	178.119.651.739,00
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	607.984.511.739,00	609.058.635.677,00	100,18	516.833.032.739,00
23	Total Pendapatan Transfer	1.974.656.073.426,00	2.119.660.334.837,00	107,34	1.768.909.871.611,00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	122.648.764.593,00	81.757.265.074,81	66,66	0,00
26	Jumlah Lain - lain Pendapatan yang Sah	122.648.764.593,00	81.757.265.074,81	66,66	0,00
27	JUMLAH PENDAPATAN	2.542.658.336.409,00	2.700.306.264.071,77	106,20	2.288.550.678.418,82

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
28	BELANJA				
29	BELANJA OPERASI				
30	Belanja Pegawai	1.307.872.909.486,00	1.214.251.946.146,00	92,84	931.254.208.717,18
31	Belanja Barang dan Jasa	475.204.310.273,00	456.353.896.124,31	96,03	618.903.996.820,58
32	Belanja Hibah	27.784.650.000,00	26.470.650.000,00	95,27	26.678.063.049,00
33	Jumlah Belanja Operasi	1.810.861.869.759,00	1.697.076.492.270,31	93,72	1.576.836.268.586,76
34	BELANJA MODAL				
35	Belanja Modal Tanah	21.311.111.150,00	20.326.281.017,00	95,38	6.424.204.345,00
36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.677.075.063,00	61.199.821.105,00	47,93	18.343.774.741,00
37	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.881.819.712,00	156.394.852.365,00	93,72	182.569.370.905,00
38	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	587.770.713.990,00	550.373.428.011,28	93,64	472.609.691.881,00
39	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	822.470.500,00	782.190.470,00	95,10	573.010.300,00
40	Belanja Modal Dana BOS	6.305.641.529,00	28.102.452.648,79	445,67	21.514.520.326,19
41	Jumlah Belanja Modal	910.768.831.944,00	817.179.025.617,07	89,72	702.034.572.498,19
42	BELANJA TAK TERDUGA				
43	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	1.033.828.109,00	34,46	2.963.437.302,50
44	Jumlah Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	1.033.828.109,00	34,46	2.963.437.302,50
45	JUMLAH BELANJA	2.724.630.701.703,00	2.515.289.345.996,38	92,32	2.281.834.278.387,45
46	TRANSFER				
47	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN				
48	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.903.474.953,00	1.903.474.953,00	100,00	1.197.406.665,00
49	Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	1.903.474.953,00	1.903.474.953,00	100,00	1.197.406.665,00
50	SURPLUS / (DEFISIT)	(183.875.840.247,00)	183.113.443.122,39	(99,59)	5.518.993.366,37
51	PEMBIAYAAN				
52	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
53	Penggunaan SiLPA	184.675.840.247,00	184.675.840.246,59	100,00	179.156.846.880,22
54	Jumlah Penerimaan	184.675.840.247,00	184.675.840.246,59	100,00	179.156.846.880,22
55	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
56	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	800.000.000,00	792.000.000,00	99,00	0,00
57	Jumlah Pengeluaran	800.000.000,00	792.000.000,00	99,00	0,00
58	PEMBIAYAAN NETTO	183.875.840.247,00	183.883.840.246,59	100,00	179.156.846.880,22
59	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	366.997.283.368,98	0,00	184.675.840.246,59

Samarinda, Mei 2019
WALIKOTA SAMARINDA

H. SYAHARIE JA'ANG



WALIKOTA SAMARINDA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Audited)

(dalam satuan rupiah)

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2019	AUDITED 2019	(%)	AUDITED 2018
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
3	Pendapatan Pajak Daerah	332.216.400.000,00	369.978.459.595,73	111,37	352.827.149.153,44
4	Pendapatan Retribusi Daerah	53.370.887.373,22	49.520.199.223,00	92,79	48.480.939.558,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.075.830.450,00	12.482.957.095,38	95,47	11.707.898.396,97
6	Lain-lain PAD Yang Sah	102.328.000.500,00	128.463.241.448,69	125,54	85.872.677.051,55
7	<i>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</i>	500.991.118.323,22	560.444.857.362,80	111,87	498.888.664.159,96
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan				
10	Bagi Hasil Pajak	70.037.267.200,00	70.167.651.448,00	100,19	93.507.456.251,00
11	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	477.040.662.400,00	770.820.147.637,00	161,58	523.611.508.712,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	717.525.738.000,00	707.113.978.000,00	98,55	659.322.535.000,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK)	268.936.655.140,00	256.326.317.367,00	95,31	234.160.199.197,00
14	<i>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</i>	1.533.540.322.740,00	1.804.428.094.452,00	117,66	1.510.601.699.160,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
16	Dana Penyesuaian	30.087.063.000,00	30.087.063.000,00	100,00	0,00
17	<i>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</i>	30.087.063.000,00	30.087.063.000,00	100,00	0,00
18	Transfer Pemerintah Provinsi				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	424.695.427.885,00	392.307.362.271,00	92,37	400.575.181.938,00
20	Bantuan Keuangan				
21	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	475.603.398.182,78	475.603.398.182,78	100,00	208.483.453.739,00
22	<i>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</i>	900.298.826.067,78	867.910.760.453,78	96,40	609.058.635.677,00
23	<i>Total Pendapatan Transfer</i>	2.463.926.211.807,78	2.702.425.917.905,78	109,68	2.119.660.334.837,00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	99.410.000.000,00	82.649.720.000,00	83,14	81.757.265.074,81
26	<i>Jumlah Lain - lain Pendapatan yang Sah</i>	99.410.000.000,00	82.649.720.000,00	83,14	81.757.265.074,81
27	JUMLAH PENDAPATAN	3.064.327.330.131,00	3.345.520.495.268,58	109,18	2.700.306.264.071,77

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2019	AUDITED 2019	(%)	AUDITED 2018
28	BELANJA				
29	BELANJA OPERASI				
30	Belanja Pegawai	1.401.736.650.655,00	1.268.404.148.597,19	90,49	1.214.251.946.146,00
31	Belanja Barang dan Jasa	633.257.680.769,00	564.254.051.911,44	89,10	456.353.896.124,31
32	Belanja Hibah	26.280.400.000,00	22.179.165.000,00	84,39	26.470.650.000,00
33	Belanja Bantuan Sosial	2.087.942.000,00	1.907.500.000,00	91,36	0,00
34	<i>Jumlah Belanja Operasi</i>	2.063.362.673.424,00	1.856.744.865.508,63	89,99	1.697.076.492.270,31
35	BELANJA MODAL				
36	Belanja Modal Tanah	44.996.686.904,00	31.076.114.929,33	69,06	20.326.281.017,00
37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158.430.263.947,00	137.366.786.670,00	86,70	61.199.821.105,00
38	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	182.450.398.906,00	167.062.262.023,43	91,57	156.394.852.365,00
39	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	931.943.867.474,00	841.680.661.519,92	90,31	550.373.428.011,28
40	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.487.113.700,00	3.083.438.453,00	88,42	782.190.470,00
41	Belanja Modal Dana BOS	39.685.077.400,00	26.507.779.506,58	66,80	28.102.452.648,79
42	<i>Jumlah Belanja Modal</i>	1.360.993.408.331,00	1.206.777.043.102,26	88,67	817.179.025.617,07
43	BELANJA TAK TERDUGA				
44	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	1.693.960.756,00	33,88	1.033.828.109,00
45	<i>Jumlah Belanja Tak Terduga</i>	5.000.000.000,00	1.693.960.756,00	33,88	1.033.828.109,00
46	JUMLAH BELANJA	3.429.356.081.755,00	3.065.215.869.366,89	89,38	2.515.289.345.996,38
47	TRANSFER				
48	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN				
49	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.968.531.745,00	1.968.531.745,00	100,00	1.903.474.953,00
50	<i>Jumlah Transfer</i>	1.968.531.745,00	1.968.531.745,00	100,00	1.903.474.953,00
51	SURPLUS / (DEFISIT)	(366.997.283.369,00)	278.336.094.156,69	(75,84)	183.113.443.122,39
52	PEMBIAYAAN				
53	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
54	Penggunaan SiLPA	366.997.283.369,00	366.997.283.368,98	100,00	184.675.840.246,59
55	<i>Jumlah Penerimaan</i>	366.997.283.369,00	366.997.283.368,98	100,00	184.675.840.246,59
56	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
57	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	792.000.000,00
58	<i>Jumlah Pengeluaran</i>	0,00	0,00	0,00	792.000.000,00
59	PEMBIAYAAN NETTO	366.997.283.369,00	366.997.283.368,98	100,00	183.883.840.246,59
60	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	645.333.377.525,67	100,00	366.997.283.368,98

Samarinda, Juni 2020
WALIKOTA SAMARINDA


H. SYAHARIE JA'ANG



WALIKOTA SAMARINDA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Audited)

(dalam satuan rupiah)

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2020	AUDITED 2020	(%)	AUDITED 2019
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
3	Pendapatan Pajak Daerah	242.910.000.000,00	314.002.648.362,68	129,27	369.978.459.595,73
4	Pendapatan Retribusi Daerah	41.216.529.000,00	42.755.656.314,00	103,73	49.520.199.223,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000,00	8.010.873.971,19	80,11	12.482.957.095,38
6	Lain-lain PAD Yang Sah	98.601.350.000,00	120.420.315.073,46	122,13	128.463.241.448,69
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	392.727.879.000,00	485.189.493.721,33	123,54	560.444.857.362,80
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan				
10	Bagi Hasil Pajak	73.827.698.400,00	101.585.284.366,00	137,60	70.167.651.448,00
11	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	323.049.912.000,00	527.291.122.431,00	163,22	770.820.147.637,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	675.500.904.000,00	670.356.522.000,00	99,24	707.113.978.000,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK)	260.057.456.000,00	230.887.008.922,00	88,78	256.326.317.367,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.332.435.970.400,00	1.530.119.937.719,00	114,84	1.804.428.094.452,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya				
16	Dana Penyesuaian	35.336.461.000,00	35.336.461.000,00	100,00	30.087.063.000,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	35.336.461.000,00	35.336.461.000,00	100,00	30.087.063.000,00
18	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	290.340.596.000,00	286.846.897.483,00	98,80	392.307.362.271,00
20	Bantuan Keuangan				
21	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	439.042.500.000,00	439.042.500.000,00	100,00	475.603.398.182,78
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	729.383.096.000,00	725.889.397.483,00	99,52	867.910.760.453,78
23	Total Pendapatan Transfer	2.097.155.527.400,00	2.291.345.796.202,00	109,26	2.702.425.917.905,78
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	102.935.723.000,00	96.300.745.000,00	93,55	82.649.720.000,00
26	Jumlah Lain - lain Pendapatan yang Sah	102.935.723.000,00	96.300.745.000,00	93,55	82.649.720.000,00
27	JUMLAH PENDAPATAN	2.592.819.129.400,00	2.872.836.034.923,33	110,80	3.345.520.495.268,58

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2020	AUDITED 2020	(%)	AUDITED 2019
28	BELANJA				
29	BELANJA OPERASI				
30	Belanja Pegawai	1.280.116.457.348,00	1.216.845.222.333,00	95,06	1.268.404.148.597,19
31	Belanja Barang dan Jasa	523.026.957.955,00	467.029.982.649,81	89,29	564.254.051.911,44
32	Belanja Hibah	138.734.427.000,00	132.303.696.116,50	95,36	22.179.165.000,00
33	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	1.907.500.000,00
34	Jumlah Belanja Operasi	1.941.877.842.303,00	1.816.178.901.099,31	93,53	1.856.744.865.508,63
35	BELANJA MODAL				
36	Belanja Modal Tanah	24.506.782.020,00	14.754.178.146,00	60,20	31.076.114.929,33
37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.953.317.816,00	115.771.805.211,00	89,09	137.366.786.670,00
38	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.057.478.814,00	121.835.065.893,00	71,64	167.062.262.023,43
39	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	861.662.007.447,00	809.804.044.133,66	93,98	841.680.661.519,92
40	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.076.950.550,00	3.948.049.638,00	96,84	3.083.438.453,00
41	Belanja Modal Dana BOS	0,00	0,00	0,00	26.507.779.506,58
42	Jumlah Belanja Modal	1.190.256.536.647,00	1.066.113.143.021,66	89,57	1.206.777.043.102,26
43	BELANJA TAK TERDUGA				
44	Belanja Tak Terduga	103.919.482.000,00	93.794.421.718,39	90,26	1.693.960.756,00
45	Jumlah Belanja Tak Terduga	103.919.482.000,00	93.794.421.718,39	90,26	1.693.960.756,00
46	JUMLAH BELANJA	3.236.053.860.950,00	2.976.086.465.839,36	91,97	3.065.215.869.366,89
47	TRANSFER				
48	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN				
49	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.098.646.000,00	2.098.645.335,00	100,00	1.968.531.745,00
50	Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	2.098.646.000,00	2.098.645.335,00	100,00	1.968.531.745,00
51	SURPLUS / (DEFISIT)	(645.333.377.550,00)	(105.349.076.251,03)	16,32	278.336.094.156,69
52	PEMBIAYAAN				
53	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
54	Penggunaan SILPA	645.333.377.550,00	645.333.377.525,67	100,00	366.997.283.368,98
55	Jumlah Penerimaan	645.333.377.550,00	645.333.377.525,67	100,00	366.997.283.368,98
56	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
57	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Jumlah Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
59	PEMBIAYAAN NETTO	645.333.377.550,00	645.333.377.525,67	100,00	366.997.283.368,98
60	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	539.984.301.274,64	100,00	645.333.377.525,67

Samarinda, Mei 2021
WALIKOTA SAMARINDA



Dr. H. ANDI HARUN



WALIKOTA SAMARINDA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Audited)

(dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	AUDITED 2021	%	AUDITED 2020
1	PENDAPATAN DAERAH	2.777.546.569.409,00	2.860.333.904.522,71	102,98	2.872.836.034.923,33
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	561.492.908.215,00	573.726.380.356,71	102,18	485.189.493.721,33
3	Pajak Daerah	341.249.590.000,00	381.933.143.494,93	111,92	314.002.648.362,68
4	Retribusi Daerah	49.326.970.000,00	41.727.346.527,00	84,59	42.755.656.314,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.447.156.000,00	4.447.636.905,13	100,01	8.010.873.971,19
6	Lain-lain PAD yang Sah	166.469.192.215,00	145.618.253.429,65	87,47	120.420.315.073,46
7	PENDAPATAN TRANSFER	2.127.210.861.194,00	2.171.166.219.590,00	102,07	2.291.345.796.202,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.319.215.964.294,00	1.351.808.116.281,00	102,47	1.565.456.398.719,00
9	Dana Perimbangan	1.291.831.346.294,00	1.324.423.498.281,00	102,52	1.530.119.937.719,00
10	Dana Insentif Daerah (DID)	27.384.618.000,00	27.384.618.000,00	100,00	35.336.461.000,00
11	Pendapatan Transfer Antar Daerah	807.994.896.900,00	819.358.103.309,00	101,41	725.889.397.483,00
12	Pendapatan Bagi Hasil	336.350.236.000,00	347.713.442.409,00	103,38	286.846.897.483,00
13	Bantuan Keuangan	471.644.660.900,00	471.644.660.900,00	100,00	439.042.500.000,00
14	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	88.842.800.000,00	115.441.304.576,00	129,94	96.300.745.000,00
15	Pendapatan Hibah	88.842.800.000,00	94.547.498.000,00	106,42	96.300.745.000,00
16	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	20.893.806.576,00	100,00	0,00
17	BELANJA DAERAH	3.317.530.870.684,00	3.069.980.559.430,72	92,54	2.978.185.111.174,36
18	BELANJA OPERASI	2.084.185.927.103,00	1.911.082.455.467,70	91,69	1.818.277.546.434,31
19	Belanja Pegawai	1.108.252.939.216,00	1.023.542.751.092,33	92,36	1.013.663.139.701,00
20	Belanja Barang dan Jasa	920.965.166.316,00	839.408.590.570,37	91,14	670.212.065.281,81
21	Belanja Hibah	54.510.816.571,00	47.726.318.805,00	87,55	134.402.341.451,50
22	Belanja Bantuan Sosial	457.005.000,00	404.795.000,00	88,58	0,00
23	BELANJA MODAL	1.120.255.347.491,00	1.077.524.414.721,03	96,19	1.066.113.143.021,66
24	Belanja Modal Tanah	26.138.176.884,00	18.687.364.684,00	71,49	14.754.178.146,00
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.184.326.834,00	123.286.277.212,60	88,58	124.524.885.611,00
26	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	152.688.629.178,00	145.854.414.211,00	95,52	113.081.985.493,00
27	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	767.477.947.125,00	752.545.267.415,43	98,05	809.804.044.133,66
28	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.766.267.470,00	37.151.091.198,00	106,86	3.948.049.638,00
29	BELANJA TIDAK TERDUGA	113.089.596.090,00	81.373.689.241,99	71,96	93.794.421.718,39
30	Belanja Tidak Terduga	113.089.596.090,00	81.373.689.241,99	71,96	93.794.421.718,39
31	SURPLUS / (DEFISIT)	(539.984.301.275,00)	(209.646.654.908,01)	38,82	(105.349.076.251,03)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	AUDITED 2021	%	AUDITED 2020
32	PEMBIAYAAN DAERAH	539.984.301.275,00	539.983.776.274,64	100,00	645.333.377.525,67
33	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	539.984.301.275,00	539.983.776.274,64	100,00	645.333.377.525,67
34	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	539.984.301.275,00	539.983.776.274,64	100,00	645.333.377.525,67
35	PEMBIAYAAN NETTO	539.984.301.275,00	539.983.776.274,64	100,00	645.333.377.525,67
36	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	330.337.121.366,63	100,00	539.984.301.274,64

Samarinda, Mei 2022
WALI KOTA SAMARINDA

Handwritten signature of Dr. H. Andi Harun
Dr. H. ANDI HARUN